

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena *Corona Virus disease Covid-19* muncul di akhir tahun 2019. Hal ini membuat gempar seluruh dunia—yang bermula dari Kota Wuhan di Cina, dan diduga berasal dari hewan kelelawar yang dimakan oleh manusia. Munculnya penyakit ini, sehingga terjadi penularan terhadap manusia Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampaknya, dengan munculnya Virus Corona hingga saat ini masih menghadapi ganasnya Virus yang berasal dari Wuhan. Tak terkecuali negara lain, yang berusaha menghadapi dan mengurangi resiko terhadap Virus Covid -19 dengan upaya kebijakan peraturan lockdown dan social distancing (Muzakir, & M Aftar Ismail 2020).

Covid-19 adalah virus yang dapat menularkan secara cepat kepada manusia, hanya dengan sentuhan atau percikan droplet manusia. sudah langsung terpapar, corona termasuk keluarga besar Virus yang cepat dan menularkan kepada manusia dan hewan pada gejala awal terhadap manusia Virus ini menyerang saluran pernafasan, menimbulkan sesak nafas, dan mulai dari sesak nafas biasa sehingga bisa menjadi lebih parah. bila tidak ditangani dan akan menyebabkan penyakit yang cukup serius seperti *Middle east respiratory syndrome* (MERS) dan sindrom yang menyebabkan pernapasan akut berat *Severe acute respiratory syndrome* (SARS) Virus ini adalah berasal dari Wuhan Cina dan menyebabkan pandemi hingga saat ini (Kurniasih Denok, 2017).

Indonesia sedang berjuang menghadapi badai pandemi corona. pasca ditemukannya positif Covid-19 di Indonesia pada bulan maret 2020, pada saat pertama Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 maret 2020. pemerintah pusat melalui kebijakan keputusan presiden (Keppres) nomor 12 tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana no-alam nasional. sejak konfirmasi pertama tersebut Indonesia mengalami tren aktif terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia, dan sejak pandemic muncul pertama kali terjadilah kepanikan masyarakat kepanikan yang terjadi menimbulkan ketimpangan sosial, masyarakat tidak sadar bahwa mereka menjadi salah satu yang mengakibatkan terjadi kepanikan sosial yang terjadi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Ketakutan dan kekhawatiran dalam beraktivitas diakibatkan adanya informasi mulut dari mulut dari beberapa pihak yang tidak mempunyai kepentingan apapun, dan kondisi ini menimbulkan perubahan yang terjadi perubahan sosial dan gejala sosial yang sangat signifikan. (Ririn Purba, 2020) *Distrust Zero Trust Society* merupakan masyarakat saling tidak percaya, terhadap individu lainnya didasari takutnya tertular virus bila interaksi dengan orang lain dan menimbulkan ketidakpercayaan dan terjadi ketimpangan sosial dan menurunkan solidaritas terhadap individu lainnya. (Sailatur Rizqi, 2020).

Pandemic yang terjadi mengakibatkan berdampak dari aspek berbagai kehidupan seperti kesehatan dampak perekonomian, dan dampak sosial. dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, seperti warga yang bekerja di bidang sektor informal seperti industri para pedagang kaki lima, home industry

seperti pusat perbelanjaan mall terkena dampaknya selama pandemic Covid-19. Omzetnya turun drastis dan sepi pembeli dan berakibat banyak pengusaha yang menutup usaha, diakibatkan masyarakat daya beli turun sehingga terjadi kekacauan berbagai aspek kehidupan. Masyarakat pun berharap terhadap pemerintah, dalam suatu pemerintahan masyarakat adalah sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat pun memberikan amanah pada pemerintah dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap masyarakat, saat terjadi pandemic Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dalam hal kepentingan masyarakat yang di butuhkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang diinginkan. Sesuai peraturan yang ditetapkan masyarakat mempunyai peran aspirasi dan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dan pengambilan keputusan baik dapat dilakukan secara langsung maupun dari lembaga lembaga sah yang menjadi dan mewakili kepentingan masyarakat. di massa pandemi yang sedang terjadi di Indonesia lembaga pemerintah, melakukan kolaborasi dengan bekerja sama dengan lembaga masyarakat, dalam mengurangi resiko Covid-19 dalam massa pandemic, seperti saat ini peran masyarakat dan pemerintah harus berjalan dengan baik pada dasarnya pemerintah perlu adanya aktor dari lembaga lain untuk mengatasi pandemic Covid-19, diperlukan adanya peran masyarakat dalam mengurangi resiko Covid-19.

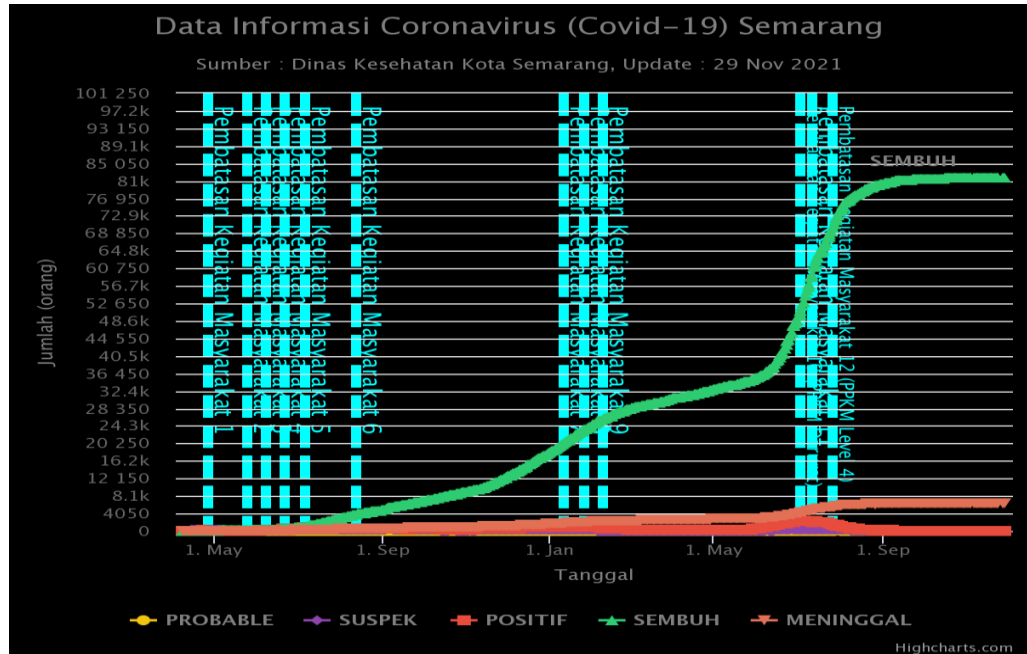
Warga negara mempunyai hak yang bersifat fundamental terhadap pemerintahnya warga negara dengan menciptakan *Good governace*

(MuisAfnini dan Regita Cahyani,2020) *Good governance* yang baik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya oleh pemerintah seperti massa pandemic Covid-19 dalam manajemen, harus memiliki sifat yang terbuka akuntabilitas, kebenaran harus memberikan informasi keterbukaan kepada masyarakat dalam penanganan Covid -19. yang dilakukan oleh pemerintah. Dari berbagai kasus fenomena Covid -19 pemerintah mempunyai peran untuk mengatasi permasalahan terjadi dan mempunyai bagian penting. pemerintah tidak bisa hanya berdiri sendiri pandemic yang terjadi perlu adanya beragam solusi, yang dalam keterlibatannya sesuai perencanaannya sesuai konsekuensinya dalam mengatasi pandemic Covid-19, dalam bekerjasama pemerintah dengan pemangku diluar pemerintahan ada berbagai stake holder dengan membentuk organisasi dan kesiapsiagaan, proses kerjasama dari berbagai pihak menjadi salah satu prioritas dalam menangani pandemic. Baik dari instansi public non public maupun seperti dengan masyarakat yang merumuskan dan terlibat dan ikut dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, harus bersama bahu membahu bersama dalam mengurangi resiko pandemi Covid-19, terbentuklah kerjasama antar stakeholder. *Model Collaborative governance* adalah upaya pemerintah dalam menangani permasalahan dengan beberapa sektor yang tidak hanya dalam pemangku pemerintahan. *Collaborative governance* merupakan suatu proses yang melatar belakangi dimana pemangku kepentingan melakukan kolaborasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dicapai dengan keterlibatan pihak lain, dengan kemampuan yang berbeda antar aktor, dengan keahlian yang berbeda dan

bekerja sama untuk mengatasi masalah pandemic yang saat ini sedang terjadi. Perlu adanya peran partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci utama memutus rantai penularan Covid-19 (Arrozaq, 2016)

Pemerintah di hadapkan tuntutan untuk mengatasi Covid-19 dengan melakukan peran nya dan aksi nyata dalam menagani pandemic Covid-19, Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang sedang menghadapi Virus Covid-19, Kota Semarang salah satu penyumbang kasus positif terbanyak di Jawa Tengah sejak diberlakukanya *New normal*. Dalam upaya mengurangi resiko pandemim Covid-19 dalam bidang kesehatan masyarakat Pemerintah Kota Semarang membuat inovasi dalam upayanya , dengan membentuk satuan gugus tugas yang berasal dari komunitas pemuda dan remaja bernama gercep (gerakan remaja cegah dan pantau Covid-19) kota Semarang, yang melibatkan berbagai kalangan komunitas diantaranya dari dari Karang taruna, bhakti husada, shaka bhakti kencana, Satgas gercep di resmikan oleh walikota Semarang pada Tanggal 2 Agustus 2021. Tujuan dibentuknya satgas gercep membantu pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi resiko Covid-19 Fokusnya gercep dalam kolaborasi dalam bidang kesehatan pencegahan dan pendeteksian terhadap masyarakat fokusnya gercep memberikan pemahaman sosialisasi perlunya vaksinasi dan taat protocol kesehatan. Dan membantu Dinas Kesehatan dalam percepatan vaksinasi dan pendeteksian. pemerintah Kota Semarang dalam percepatan vaksinasi tidak berjalan sendiri dengan melakukan *Collaborative* upaya dalam mengurangi resiko Covid-19 bisa tercapai Tujuan dari *Collaborative governance*, membangun dan menekankan bahwa untuk mengurangi resiko Covid-19 yaitu gotong royong. Gerakan remaja cegah dan pantau Covid-19 membantu pemerintah dalam mengurangi resiko Covid-19 Kota Semarang, peranya dengan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat, di berbagai lokasi di Semarang. sebelum turun langsung diberikan pelatihan terlebih dahulu dan materi, Gerakan remaja cegah dan pantau Covid -19 pun mempunyai peran dalam

membantu masyarakat yang terkena dampak selama pandemik yang terjadi di Kota Semarang.



GAMBAR 1. 1 DATA INFORMASI COVID-19 DI KOTA SEMARANG

Dengan melihat data di atas, adanya kenaikan kasus sembuh, Banyaknya kasus sembuh meningkat dan kasus konfirmasi positif menurun di bulan Agustus 2021. Dan terus meningkat kasus sembuh hingga September 2021.

Gerakan remaja pantau Covid -19 memiliki peranan dan beberapa fungsi, seperti memberikan informasi terhadap masyarakat diantaranya pendeteksian dan pencegahan dan memberikan pemahaman terhadap bahaya Covid -19. seperti memberikan edukasi, pentingnya memakai masker saat keluar rumah dan jaga jarak dan jangan berkerumun bila tidak berkepentingan .

Dibentuknya satuan tugas ini, dalam mengurangi resiko Covid-19 penanganan dan mekanisme yang dilakukan pemerintah Semarang merupakan

suatu tindakan untuk mengurangi resiko Covid-19 di Kota Semarang. demi tujuan dan terwujudnya Kota Semarang yang aman (PutriErvita Ardila, 2020) dan Kota Semarang meningkatnya kasus Covid -19 banyaknya dari cluster keluarga disebabkan diantaranya dari lalai nya remaja yang selalu tidak mengerti aturan dan tidak mematuhi protocol kesehatan. Sehingga terjadi penularan Covid-19 dan menularkan terhadap keluarga yang berada di rumah, dan peran serta remaja dalam mengurangi resiko Covid -19 belum dilibatkan. Dalam peranya pemerintah Kota Semarang memunculkan inovasi untuk menggerakan dan keaktifan peran remaja untuk bergerak bersama dalam mengurangi resiko Covid-19, yang terjadi di Kota Semarang. Hasilnya Kota Semarang berhasil keluar dari zona merah dengan terbentuknya *hard immunity* proses Vaksin yang berjalan setiap hari untuk masyarakat berbagai lokasi Di Semarang, Vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 100%. Tidak terlepas peran nyata Gercep, memberikan Himbauan yang tidak ada batasnya dalam mengingatkan masyarakat bila akan beraktifitas melakukan protokol kesehatan yang ketat.

Collaborative governance yang dilakukan pemerintah Kota Semarang bertujuan untuk memecahkan masalah untuk mengurangi resiko Covid-19 di Kota Semarang. Sistem pemerintahan akan berjalan dengan baik jika tata kelola prinsipnya mengikutsertakan stakeholder, warga masyarakat ikut partisipasi dalam musyawarah keputusan serta gotong royong, dapat bekerjasama sehingga akan menyatukan dan mencapai tujuan. Keberhasilan dalam suatu perumusan untuk mewujudkan visi misi dalam nilai bersama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Dalam Mengurangi,

dengan membentuk satgas Covid-19 gerakan remaja cegah dan pantau Covid-19 (Gercep),Tujuannya dibentuk satgas gercep, adalah untuk membantu pemerintah Kota Semarang mengurangi resiko Covid-19 di Kota Semarang. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengambil Kota Semarang dikarenakan isu yang sangat menarik untuk di teliti dikarenakan pemerintah Kota Semarang mengandeng komunitas dari elemen remaja dan pemuda dalam upaya, mengurangi resiko Covid-19, *Collaborative Governance* di kota semarang, bentuk kerja sama antar stake holder baik itu pihak Pemerintah Kota Semarang peranya memimpin dan memberikan arahan kepada aktor aktor yang terlibat kolaborasi memberikan arahan sesuai tupoksi . Komunitas masyarakat yang berasal dari remaja dan pemuda . Lembaga terkait seperti BPBD peranya penyemprotan disinfektan dan membagikan masker kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Semarang fokus percepatan vaksinasi kepada masyarakat dibantu oleh peranya gercep dengan membantu dalam memberikan sosialisasi langsung terhadap masyarakat pentingnya vaksinasi dan selalu taat protocol kesehatan. untuk mencapai tujuan mewujudkan Kota Semarang yang aman dari penularan resiko Covid-19,maka dari itu penelitian ini mengambil judul “PRAKTIK COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGURANGI RESIKO PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS: KOMUNITAS GERAKAN REMAJA CEGAH DAN PANTAU COVID-19 KOTA SEMARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *Collaborative governance* dalam mengurangi resiko pandemic Covid-19 di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran pemerintah Kota Semarang, BPBD , Dinas kesehatan , Gercep dalam praktik *Collaborative Governance* dalam mengurangi resiko covid-19 Di Kota Semarang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui praktik *Collaborative Governance* yang dilakukan pemerintah Kota Semarang bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang , BPBD Dan Komunitas Gercep Gerakan Remaja cegah dan pantau Covid-19 keterlibatannya membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mengurangi Resiko Pandemi Covid-19.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya. dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya kajian keilmuan yang berkaitan dengan *Collaborative Governance*.

- Mengetahui sinergitas yang terjadi dalam melakukan peanggulangan Covid-19 di Kota Semarang.
- Mengidentifikasi bagaimana pola gerak yang dilakukan Komunitas Gercep dalam mengurangi resiko Covid-19, pada masyarakat di Kota Semarang.

1.3.2.1 Manfaat praktis

- Untuk memberikan gambaran kepada pemerintah khususnya Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Semarang. dalam mengurangi resiko Covid-19 dengan perspektif *Collaborative governance*.
- Untuk memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat tentang *Collaborative governance*. Dilakukan oleh pemerintah kota semarang dalam mengurangi resiko Covid-19.

1.4 Tinjauan pustaka

Berikut beberapa bahan yang menjadi perbandingan. Penelitian Kajian serta analisis perbandingan antara penelitian saat ini dan Penelitian terdahulu adapun studi pustaka yang menjadi bahan literature yaitu:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan
1	Rosidin, Rahayuwati	Pola pencegahan paparan Covid-	Kajian ini lebih menekankan pada

		19 yang dilakukan berdasar kontribusi Kajian	partisipasi tokoh, masyarakat dalam mengkomandoi upaya pencegahan dalam lingkup masyarakat, pada lingkup desa sebagai bentuk upaya penanggulangan laju kasus Covid-19
2	Muchlasin dan Suyatno	Peran <i>Civil Society</i> dalam menghadapi pandemic covid-19 di Desa Karang Tengah Kemangkon Kabupaten Purbalingga	Hasil penelitian menunjukan peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengurangi resiko covid-19. ada banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa karang tengah, Seperti dengan penjagaan palang pintu masuk desa, dengan pembersihan semprotan disinfektan dan masyarakat mengawasi apabila ada warga luar yang ingin masuk dan harus melakukan karantina terhadap warga yang datang dari luar kota.
3	Arditama dan Lestari	Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah	Dalam menjalankan jogo tonggo seperti memberi himbauan dan memberikan edukasi menaati peraturan yang sudah ditentukan pemerintah jawa tengah dalam mengurangi resiko covid-19. sehingga dengan adanya kebijakan tersebut perlu adanya kolaborasi antara pemerintah
4	Nur Rani Elvira	Implementasi kebijakan Pembatasan	Hasil penelitian menunjukan kebijakan yang dilakukan

	dan Yenistika Safarinda	Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanganan Pandemic Covid-19 di Kota Semarang	pemerintah kota semarang yang disebut pkm pembatasan kegiatan masyarakat adalah bertujuan untuk dilakukan pembatasan kegiatan namun ada kelonggaran pada aktivitas ekonomi
5	Halil Khusairi	Peran Masyarakat dan Mahasiswa dalam mengatasi Covid-19 melalui Pembentukan Kelompok Relawan Satu Gugus di Tanah Vogok Jambi	Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya menghadapi Covid-19 perlu adanya peran, yang lebih baik dari setiap individu baik itu dari masyarakat ataupun dari kalangan pelajar, seperti mahasiswa Peran masyarakat dalam upaya mengurangi Covid-19 cukup baik dengan taat peraturan yang dihimbau pemerintah, dalam menjalankan protocol kesehatan, dan peran mahasiswa dalam peranya relawan satuan gugus.
6	Mustaqimah Hidayah dan Hasan Bastomi	Peran Masyarakat Sipil Keagamaan di Tengah Pandemic	Peran NU dalam menghadapi pandemic Covid-19 di indonesia hasil penelitian, menunjukkan NU membuat dan menggerakkan dengan membuat satuan gugus tugas yaitu satgas NU peduli Covid-19 serta asosiasi dibawah naungan NU tujuannya
7	Sukanti dan Nur Faidati	<i>Collaborative Governance</i> dalam menagani Stunting di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam <i>Collaborative governance</i> dalam

		Kabupaten Sleman	penagananya yang diukur dengan dinamika kolaborasi seperti prinsip bersama dan motivasi bersama,dengan cukup baik dengan kapasitas bersama
8	Zendrato	Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemic Covid-19	Penelitian ini menekankan bagaimana urgensi, penerapan pola hidup sehat (PHBS) sebagai pemenuhan konsep lebih baik mencegah daripada mengobati yang diperlu dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemic Covid-19.
9	Arisanti dan Suderena	Penanganan Pandemic Covid-19 Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bersama KNPI Gianyar Kabupaten Gianyar Bali	Membahas kolaborasi antara pemerintah kabupaten gianyar dengan komite nasional pemuda Indonesia. kabupaten gianyar dalam melakukan, kegiatan preventif Covid-19 melalui teknologi informasi,berupa aplilkasi karina memiliki fungsi pemantauan proteksi mandiri.
10	Hakam	Gerakan Mahasiswa Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Padang	Hasil penelitian membahas gerakan yang di bentuk untuk melakukan tindakan pencegahan bersama terhadap paparan covid-19, menekankan pembahasan pada tindakan yang dilakukan secara nyata dalam rangka, pencegahan

			Virus Covid-19 Dalam lingkup Kota Padang
--	--	--	------------------------------------------

Table 1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas pada dasarnya semua berfokus terhadap peran masyarakat dalam mengurangi resiko pandemic Covid- 19, akan tetapi sepanjang pengetahuan penelitian dalam mengurangi resiko Covid-19 penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang kolaborasi antara pemerintah Kota dan kelompok Organisasi Masyarakat, khususnya peran remaja dalam mengurangi resiko Covid-19. Sehingga kebaruan dari penelitian ini, yaitu *Collaborative governance* dalam mengurangi resiko Covid-19, seperti kasus yang terjadi di Kota Semarang pemerintah Kota Semarang. Membentuk gercep gerakan remaja cegah dan pantu Covid-19 dalam mengurangi resiko covid-19 maka dari itu peneliti bukan dari pemikiran orang melainkan dari pemikiran peneliti sendiri

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Collaborative governance

Menurut (Ansell Chriss & Alison Gash, 2007) salah satu bentuk yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang kolaboratif. setiap aktor adalah yang mempunyai kepentingan boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah hanya menjadi salah satu aktor di dalamnya. Kapasitas internal dan kemampuan tidak bisa menjadi acuan dalam pemerintah namun perlu adanya faktor pendukung dalam prosesnya. Masalah keterbatasan sumberdaya dan kemampuan pemerintah dalam

menangani masalah dalam hal ini menginisiasi pemerintah untuk menjalankan kolaborasi kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu masyarakat, Komunitas masyarakat dan sesama pemerintah, sehingga akan bisa terjalin kolaboratif dalam mencapai tujuan program dan tujuan yang akan dilakukan. *Colaborative governance* adalah sebuah tindakan pengaturan mengatur lembaga public, satu atau lebih dan terlibat langsung dengan kepentingan pemangku non public proses mengambil keputusan yang kolektif bersifat formal.

Collaborative governance adalah proses yang bersifat kolektif, adaptif, egalitarian dan partisipasi. Proses koordinasi dan pemufakatan keputusan harus diikuti oleh partisipan yang mempunyai otoritas substansi didalamnya. Adapun alurnya dari beberapa stakeholder mempunyai kewenangan dan kesempatan untuk mengimplementasikan aspirasi dalam proses kolaborasi. *Governance* dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama kompromi ,interaksi dari beberapa elemen yang memiliki tujuan bersama dalam mennghadaapi suatu permasalahan elemen terkait individu lembaga atau pihak pihak yang didalamnya terlibat secara langsung untuk mencapai tujuan bersama. nilai bersama dan norma, Beberapa pihak dalam kerjasama mempunyai hak kedudukan bersifat setara, walaupun terikat dalam tujuan bersama dan kesepakatan bersama masing masing pihak mempunyai hak yang bersifat setara dalam mengambil keputusan yang independen (Purwati & Nurul 2016).

Kolaborasi dapat disimpulkan seperti yang telah di kutip di atas sehingga bisa di katakan sebagai susunan pemerintah dimana lembaga pemerintah atau non pemerintah bisa terlibat aktif bersama stake holder yang bukan dari pemerintah, untuk pengambilan proses keputusan yang sifatnya formal dan kelompok yang berorientasi pada deliberative serta consensus. Yang berasal dari latar belakang baik dari pemerintah dan masyarakat sipil (, *civil society* , *government*) untuk mencapai sasaran publik, maka dalam praktik *collaborative* hubungan egaliter yaitu memposisikan semua seluruh aktor yang terlibat kolaborasi dalam kedudukan, fungsi dan tugas masing-masing aktor.

Konsep dan Prinsip *Collaborative governance*

Konsep dalam *collaborative governance* berkaitan dengan kerja sama dari beberapa instansi atau lembaga publik dengan masyarakat yang terlibat merencanakan, menentukan dan menjalankan misi sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Prinsip dari *collaborative governance* yakni tiap-tiap komponen yang terlibat memahami akan masalah dan kebutuhannya bersama serta disepakati bersama langkah-langkah yang akan dilakukan. Hal serupa tertera dalam Quintin (2012) bahwa *collaborative governance* mencakup adanya interaksi formal dan informal dalam identifikasi permasalahan sampai pengambilan keputusan. Proses kerja sama yang dilakukan dalam pemerintahan yang kolaboratif memerlukan penyediaan fasilitas bagi sektor publik mapupun privat beserta masyarakat.

Steven Greenwood dalam *Collaborative governance: Principles, Processes, and Practical Tools* menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang diutuhkan dalam *collaborative governance*, yakni kepemimpinan, forum, dan dukungan. Kepemimpinan dalam hal ini menyatukan sektor yang terlibat dalam forum dan perlunya dukungan dalam identifikasi masalah di

tiap kebijakan yang akan dibuat. Adanya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan bersama-sama memutuskan suatu kebijakan dan dalam pengimplementasiannya diharapkan dapat menangani dan menyelesaikan masalah yang kompleks dapat terfasilitasi dalam satu misi (Sudarmo, 2016). Menurut Ansell dan Gash (2007:6) terdapat enam kriteria dalam *collaborative governance*, antara lain :

- 1) Forum digagas oleh instansi atau lembaga publik
- 2) Peserta yang terlibat dalam forum tersebut merupakan aktor swasta
- 3) Peserta dalam forum memiliki hak dalam menentukan keputusan
- 4) Forum memiliki tujuan sebagai pencarian keputusan sesuai kesepakatan bersama
- 5) Kolaborasi dilakukan secara terorganisir
- 6) Orientasi kolaborasi menghasilkan kebijakan dan manajemen publik

c. Tujuan Penerapan *Collaborative governance*

Ansell dan Gash (2007:544) menyatakan bahwa alasan penting diterapkannya *collaborative governance* karena sebagai bentuk respon dari gagalnya implementasi kebijakan yang telah dilakukan, faktor politik dalam penetapan regulasi serta banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan. *Collaborative governance* dibuat karena terdapat beberapa alasan-alasan penting seperti rumitnya permasalahan mengakibatkan perlunya bantuan instansi lain, konflik antar aktor kepentingan yang sulit diredam, sebagai bentuk usaha mencari metode tepat guna mencapai legitimasi politik, gagalnya penerapan kebijakan, kelompok-kelompok yang menghambat keputusan, pengerahan kelompok kepentingan yang lebih terorganisir dan banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan. Kemudian dalam Yulyana Dewi (2019, 205) mengungkapkan bahwa adanya keterlibatan dan keterikatan antar pihak-pihak yang berkepentingan terdapat tujuan untuk mencapai konsensus yang menguntungkan dengan manfaat bisa menghasilkan pelayanan maupun barang. Menurut Nur Cahya (2020, 12) dengan

dilaksanakannya kolaborasi dianggap sebagai solusi dari gagalnya implementasi program yang hanya dilakukan oleh satu lembaga dan banyaknya pihak yang terlibat dapat mengurangi tingginya biaya penanganan.

Model dan Proses *Collaborative governance*

Model tahapan *collaborative governance* dalam Ansell dan Gash (2007:8) antara lain :

1. **Kondisi Awal (*Starting Condition*)**

Tahapan ini para pemangku kepentingan menjalin relasi dengan latar belakang yang berbeda namun memiliki visi dan misi bersama, menjalin kerja sama, kepercayaan dan kekuatan yang terbangun dalam suatu hubungan kolaborasi.

2. **Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)**

Kepemimpinan dalam hal ini menjadi faktor penting dalam terselenggaranya hubungan kerja sama antar pemangku kepentingan. Kepemimpinan fasilitas diperlukan guna mengukur keefektivitasan manajemen dari kerja sama antar pihak yang terlibat dapat berlangsung kelancaran kinerja, adanya musyawarah yang menghasilkan peraturan yang jelas, penyediaan forum-forum kesepakatan dan keputusan yang kredibel serta meyakinkan seluruh pihak.

3. **Desain Institusional (*Institutional Design*)**

Desain institusional mengarah pada adanya aturan-aturan dasar atau tata cara terkait prosedural proses kolaborasi yang telah disepakati terdapat keterbukaan secara menyeluruh atau inklusif.

4. **Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)**

Proses kolaborasi merupakan tahapan perkembangan dari adanya pengelolaan urusan publik. Secara singkat proses dapat dilihat dari awal penentuan permasalahan, tujuan dan pengimplementasian. Tahapan dalam proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007:15) dapat diuraikan sebagai berikut

Face to Face Dialogue

Trust Building
Commitment to Process
Share Understanding
Intermediate Outcomes

Dalam Kolaborasi (Krik Emerson, Tina Nabatchi dan Stephen Balogh, 2012) menjelaskan *Collaborative* yang terjadi waktu ke waktu dilakukan melalui beberapa tahapan. (1) Dinamika (2) Tindakan *Collaborative* (3) Dampak Dan Adaptasi pada proses *Collaborative* (Emerson et al, 2012) dalam tahapan kolaborasi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam pengelolaan suatu aspek urusan public, dan untuk mengungkap proses kolaborasi dijelaskan beberapa komponen yang menjadi suatu proses *Collaborative* diantaranya Dinamika kolaborasi. Menggambarkan tahapan *Collaborative* sebagai tahapan linear statis dimulai dengan sebuah intro pencarian masalah, implementasinya hingga berujung pada masalah yang disetel dalam rancangan jadwal menurut dinamika yang terjadi melihat sebagai siklus orientatif yang interaksi. Dalam proses *Collaborative governance*, dinamika bagian yang paling penting seberapa baik pengungkapan dalam pelaksanaan *Collaborative* terdapat dinamika sebagai berikut.

1.5.2 **Dinamika Kolaborasi(*Collaboration Dynamics*)** sistem utama dan vital pada suatu kolaborasi, didalam dinamika ini terkandung unsur penting berjalanya *Collaborative*.

1.5.3 **Pergerakan prinsip bersama (*Principled Engagement*)**

Situasi dan kondisi yang berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu dimana *Collaborative* dilakukan dengan berdialog secara langsung, dalam tahapan ini berjalanya suatu proses terdapat tujuan. penegasan kembali pembentukan dalam tahapan dan tujuan bersama mengembangkan prinsip pemahaman yang sering di ungkap dalam berbagai hal perspektif kejadian.

Pemangku yang terlibat dan karakteristik masing masing aktor yang berjalan, merupakan hal yang mempengaruhi dan elemen kunci dalam menjalankan kolaborasi berupa baik prinsip bersama, dan selanjutnya setelah berjalan, sehingga terbentuknya pergerakan prinsip bersama terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut ialah sebagai berikut:

- Pengungkapan dalam proses mengungkapkan kepentingan yang di jalankan bersama dan pengungkapan dapat di lihat melalui analisis, mengapa aktor tersebut bersedia untuk bergabung dalam kolaborasi

- Delibrasi dilakukan dengan adanya diskusi bersama, dileberasi dalam kolaborasi telah terbentuk dengan adanya diskusi bersama, artinya terdapat dorongan untuk mengungkapkan pendapat.
- Determinasi adalah serangkaian tindakan bersama dalam penetapan tujuan kolaborasi determinasi terdapat dua jenis yaitu, substantif dan primer. determinasi primer, lebih lebih fokus kepada dalam pembuatan keputusan yang procedural (teknis proses kolaborasi jadwal pertemuan, kelompok kerja).

1.5.3.1 Motivasi Bersama (*Shared motivation*)

Dimensi kolaborasi adalah termasuk dalam motivasi bersama, yang di dalamnya bertujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama motivasi bersama menekankan mengarah dan menekankan pada elemen resanional dan interpersonal. Dalam proses kolaborasi dan dinamikanya yang biasa disebut modal sosial, Menurut (Emerson Nabatchi&Balogh, 2012) motivasi bersama juga penguatan diri dalam membangun kebersamaan dan memperkuat dalam meningkatkan dan mencapai tujuan yang sama. Dengan proses prinsip dan pergerakan bersama di dalam motivasi bersama terdapat beberapa komponen diantaranya yaitu:

- Kepercayaan bersama perlunya usaha terus menerus untuk mengetahui (Discover) untuk membuktikan kelayakan dan kepercayaan satu sama lain. dan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi suatu hubungan seperti hubungan aktor dalam

kolaborasi dengan aktor lainya apakah akan memberikan kepercayaan.

- Pemahaman bersama adalah sesama aktor harus saling percaya, dan saling mengerti dan menghargai perbedaan. Pembentukan bersama terbentuk menuju pada kualitas individu dan pada kualitas interaksi yang interepasional dalam Organisasi.
- Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*Capacity for joint ction*) *Collaborative* dalam kapasitasnya untuk menghasilkan outcome, yang akan dicapai dengan tindakan bersama yang tidak bisa dicapai, hanya dengan satu aktor saja atau oleh individu saja karena kolaborasi dalam mencapai tujuan. Kooperatif mencapai suatu tujuan bersama dengan demikian aktor dalam mencapai tujuan harus menghasilkan kapasitas baru untuk melakukan tindak bersama dalam kurun waktu tertentu.

1.5.3.2 Tindakan dalam *Colaborative* (*Collaborative Actions*)

Memajukan dan memfasilitasi *Collaborative Governance*, merupakan tindakan dalam mencapai tujuan dan akan sulit, Jika mengandalkan satu organisasi atau kelompok jika hanya bertindak sendiri. Dan tindakan dalam kolaborasi berupa event kegiatan, atau diskusi dan baik buruknya dapat dilihat dari pembangunan pemahaman benar kolaborasi para aktor. menurut (Emerson& Nabatchi, 2012) *Collaborative* dalam tindakanya harus rinci dan jelas karena hal ini akan

sulit, jika *Collaborative* yang akan dilakukan dan *Collaborative* itu sendiri tidak dilaksanakan dibuat secara eksplisit Karakter.

Beberapa karakter dalam *Governance* yang dominan untuk menjalankan *Collaborative* yaitu:

- *Governance* memiliki makna yang luas daripada *Government*, dalam melibatkan aktor non negara yang akan saling ketergantungan antar organisasi. dan saling terlibat dalam pengambilan keputusan
- Berakar pada peraturan akibat negosiasi dan di regulasikan saling percaya dan kesepakatan antar aktor.

1.5.3.3 Dampak dan adaptasi (*Outcomes and Adaptions*)

Dampak yang diperoleh dihasilkan dampak yang diharapkan selama kolaborasi adalah *Smaal Wins*, merupakan hasil positif selama berlangsung dan memberikan semangat kepada aktor yang sedang menjalankan tugasnya. hal yang tidak diharapkan seperti dampak yang terjadi selama pelaksanaanya seperti adanya kendala dampak dan kendala secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai dampak yang muncul dapat dijadikan evaluasi dan berbagai dampak yang muncul menghasilkan *feedback*. untuk dievaluasi dan diadaptasi, adaptasi yang baik adalah aktor dapat memberikan *feedback* dan menyampaikan kekurangan apa saja yang terjadi. Adaptasi didasarkan dengan prioritas dan tujuan untuk keperluan dalam menjalankan sebuah kolaborasi,

menjadikan kemajuan kolaborasi menjadi lebih baik dan terjaga (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Dari teori yang sudah di jelaskan teori yang digunakan dalam proses penelitian di Kota Semarang menggunakan teori dalam *Collaborative* yang terjadi waktu ke waktu dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

- Dinamika
- Tindakan *Colaborative*
- Dampak dan adaptasi pada proses *Colaborative*

1.6 Definisi Konseptual dan Operasional

1.6.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan dalam memahami konsep yang dikemukakan untuk memperjelas pemahaman atau pemikiran. Adapun batasan konseptual dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- *Collaborative Governance* yakni usaha pemerintah untuk pengelolaan pemerintahan yang bersifat kolaboratif. *Collaborative* berorientasi Deliberative, dan Consensus. Pihak kolaboratif tersebut berasal dari latar belakang dari pemerintah dan masyarakat sipil

(*Civil society*) dan Pemerintah (*Government*) (Ansell Chriss & Alison Gash 2007).

Collaborative Governance merupakan suatu strategi dalam pengelolaan urusan public, dan Menemukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. terdapat proses dalam memecahkan masalah dijelaskan beberapa komponen yang menjadi suatu *Proses Collaborative* diantaranya Dinamika kolaborasi, tindakan dampak dan adaptasi, (Krik Emerson ,Tina nabatchi & Balogh 2012) .

- Dinamika dalam proses *collaborative* merupakan bagian yang sangat penting seberapa baik pengungkapan dalam menjalankan *Collaborative governance* mengungkapkan kepentingan, yang dijalankan bersama selama proses *Collaborative*. dan dinamika delibrasi dilakukan dengan adanya pertemuan dan diskusi forum, motivasi bersama adalah dorongan sikap untuk melakukan kerjasama dan mencapai tujuan secara bersama. Dan kapasitas bersama dalam melakukan tindakan adalah serangkaian kegiatan kolaborasi yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam satu tujuan.
- Tindakan *Collaborative governance* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok untuk mencapai tujuan dalam waktu yang singkat. Dengan terus menjaga pola komunikasi yang terjalin antara pemangku dalam mempercepat penanggulangan.

Collaborative governance tindakan yang dilatar belakangi oleh, suatu pemikiran pemerintah dalam mencapai tujuan dan perlunya peran dari organisasi dalam menjalankannya.

- Dampak dan adaptasi merupakan hasil yang di peroleh ditimbulkan saat selama berjalanya kolaborasi. dampak yang menjadi harapan selama berjalanya *collaborative* adalah *Smaal Wins*, Adalah hasil positif berbagai dampak yang muncul dapat dijadikan evaluasi dan berbagai dampak yang muncul menghasilkan *Feedback* untuk di evaluasi dan didiskusikan.

1.6.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan objek pelaksanaan yang telah ditetapkan peneliti. Indikator teori *Collaborative governance* dari Emerson Nabatchi & Balogh (2012) harus bisa di lihat tahapanya karena sebuah collaborative harus dilihat dari tahapanya. Indikator tahapan ini untuk mengukur *Collaborative governance* yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam mengurangi resiko Covid-19.

Table 2 DEFINISI OPERASIONAL

No	Teori Collaborative governance	Variable	Indikator aktor Collaborative Governance
1	(Emerson,NabatchidanBalogh,2012)	Dinamika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanyapergerakanprinsipbersama pemerintah Kota Semarang ,BPBD Dan Komunitas Gercep dialog tatap muka seperti seminar atau melalui perantara teknologi Dalam membahas tujuan dilakukanya kolaborasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengungkapan aktor yang terlibat kolaborasi BPBD ,Dinkes ,Gercep menjalankan tugas praktik sesuai tupoksinya yang diarahkan oleh Pemerintah Kota Semarang b. Delibrasi (diskusi bersama) dilakukan pemerintah Kota Semarang dengan BPBD ,DinasKesehatan , Gercep membahas dan memberikan masukanya selama Berjalnaya kolaborasi 2. Adanya motivasi bersama adanya dorongan sikap untuk melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama selama berjalanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang , BPBD , Komunitas Gercep <ol style="list-style-type: none"> a. Kepercayaan bersama menjaga rasa percaya selama berjalnaya kolaborasi aktor yang terlibat b. Pemahaman bersama saling menjaga kepercayaan saling mengerti terhadap aktor selama kolaborasi. Dengan Dinas Kesehatan ,BPBD, Dan Gercep c. Legitimasi internal keadaan internal yang melakukan kolaborasi menjalankan tugas sesuai tugasnya yang diarahkan Pemerintah kota Semarang baik itu BPBD , Dinas Kesehatan , komunitas Gercep d. komitmen 3. kapasitas bersama adalah serangkaian kegiatan yang

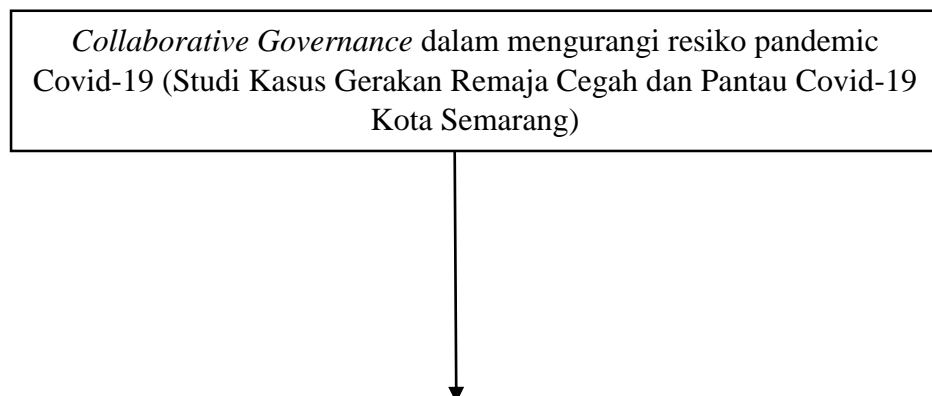
			<p>pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Pemerintah Kota Semarang memberikan arahan , BPBD fokus dalam Penyemprotan dan pembagian masker . Dinas Kesehatan fokus dalam percepatan Vaksinasi ,Gercep membantu Dinas Kesehatan dalam vaksinasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya vaksinasi dan selalu mematuhi protocol Kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prosedur dan kesepakatan bersama b. kepemimpinan melakukan koordinasi seperti yang dipimpin oleh pemerintah Kota Semarang kepada aktor untuk menjalankan tugas sesuai tupoksinya , c. pengetahuan pemahaman aktor dalam menjalankan tugasnya ,BPBD ,Dinas Kesehatan Gercep menjalankan tugas yang sudah diberikan tupoksi yang diberikan Pemerintah Kota Semarang . d. sumberdaya unsur yang dapat dikembangkan sumberdaya memiliki potensi seperti Komunitas Remaja di Kota Semarang . memiliki potensi dan di kembangkan membantu pemerintah Kota Semarang
		Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen dari peran Gercep dengan memfasilitasi dengan terus memberikan peran nyata dengan bersosialisasi langsung memberikan edukasi pemahaman Kepada masyarakat. agar menumbuhkan kesadaran bahanya Covid-19. 2. Adanya tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dengan

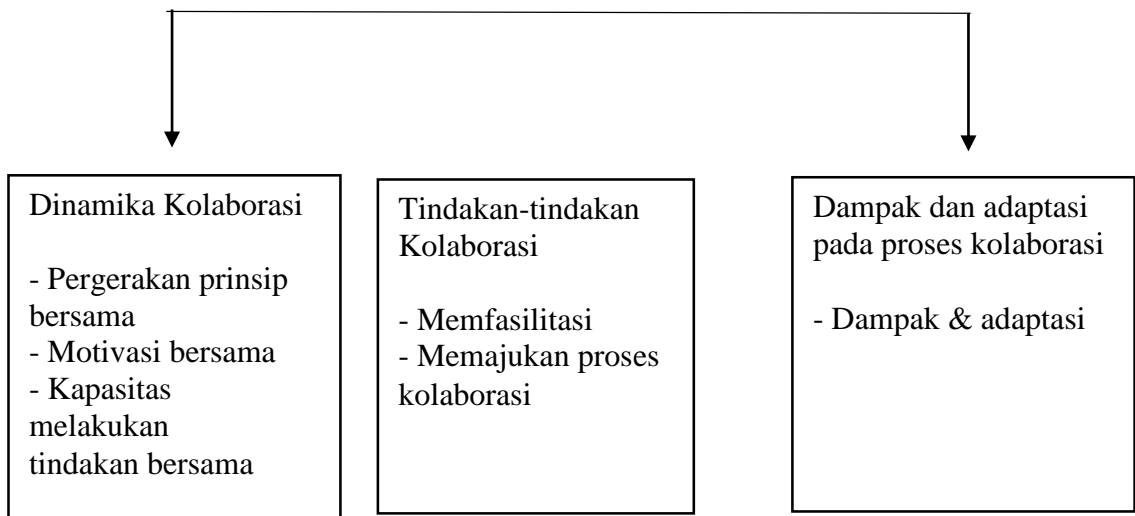
			memajukan proses kolaborasi dengan menjaga kerjasama , dan pemahaman bersama BPBD , Dinas kesehatan ,Gercep pola hubungan yang terjalin antar pemangku kepentingan. dan proses komunikasi lebih dekat lagi.
		Dampak dan adaptasi	Dampak yang dihasilkan selama berjalanya kolaborasi antara BPBD , Dinas Kesehatan , Gercep . adaptasi dalam berjalannya kolaborasi. dengan adanya kritikan dan masukan dari aktor yang menjalankan tugasnya.

1.7 Kerangka Pikir dalam Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian adalah sebuah pondasi dan landasan untuk merancang suatu teori dan yang digunakan sebagai pola konsep dalam penelitian. Dalam penelitian ini maka akan diraikan Collaborative governance dalam mengurangi resiko covid-19. studi kasus (gerakan remaja cegah dan pantau Covid-19 Kota Semarang) menggunakan 3 variabel untuk melaksanakan *Collaborative Governance*. yaitu 1. Dinamika 2.tindakan-tindakan kolaborasi 3. Dampak dan adaptasi pada *Collaborative governance*.(Balogh,dkk 2012)

Table 3 KERANGKA PIKIR





1.8 Metode penelitian

Metode penelitian suatu rancangan cara dan proses dalam merangkai ilmu pengetahuan yang sistematis (Suryana, 2010) dalam suatu penelitian guna dapat menunjukkan kebenaran yang sedang terjadi dan mampu memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian untuk dikaji agar dalam permasalahan yang akan diangkat bisa dicapai dan diteliti. Untuk menemukan jawabannya, dalam penelitian metode penelitian tidak terlepas untuk menentukan tahapan tahapannya.

1.8.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan ini dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur dan menghasilkan suatu data deskriptif berbentuk kata lisan tertulis hasil pengamatan objek serta perilaku dari sumber yang diamati (Sugiyono, 2014) bentuk dan jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan studi kasus yang berpusat dalam dan susunan data dikumpulkan untuk dianalisa dalam memecahkan suatu masalah (Salim, 2006) bentuk deskripsi representatif ialah suatu fenomena yang diamati lalu diolah dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat menelaah seberapa efektif. *Collaborative Governance*, yang dilakukan pemerintah kota Semarang dengan dibentuknya gercep (Gerakan remaja dan pantau covid-19) dalam mengurangi resiko covid-19 di Kota Semarang.

1.8.3 Jenis Data

1.8.3.1 Data Primer

Penelitian ini akan menggunakan sumber Data primer merupakan semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pertanyaan kepada narasumber.

1.8.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melalui mencatat keadaan konsep penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui dari studi pustaka seperti: buku, jurnal, skripsi, undang-undang, media masa, internet, web, arsip, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.8.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. dilaksanakan di Pemerintah Kota Semarang ,Teknisi jajaran Komunitas Gercep , Dinas kesehatan kota semarang Dan BPBD menjadi lokasi penelitian sebagai pemegang kewenangan pelaksanaan *Colaborative governance* dalam mengurangi resiko covid-19

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Untuk cara pengambilan teknik

pengumpulan data ialah langkah strategis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data secara langsung dan riil. karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2010)

1.8.5.1 observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap masalah terkait *Collaborative governance* dalam mengurangi resiko Covid1-19 di Kota Semarang . Observasi adalah kegiatan mengamati kondisi yang terkait, keadaan maupun situasi yang sedang berkembang dan terjadi di lapangan.

1.8.5.2 Teknik Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam, dari responden (Sugiyono, 2014). Sedangkan Moleong (2010) berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberi jawaban. Wawancara dilakukan dengan metode *semi-structured*, yang artinya bahwa pihak pewawancara mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan lalu diperdalam agar mendapat informasi yang lebih lengkap.

Dalam tahap wawancara, untuk mengantisipasi kesalahan dalam memberikan informasi atau informasi yang kurang lengkap dan

signifikan serta kurang jelas, maka peneliti meminta izin untuk menggunakan alat pendukung wawancara untuk dokumentasinya kepada narasumber, yang meliputi kamera, perekam suara atau alat-alat lainnya, dan sebelum peneliti akan memulai wawancara, terlebih dahulu narasumber akan dijelaskan dan dipaparkan terkait topik penelitiannya secara singkat.

1.8.5.3 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data dengan berbagai macam validasi data dan dokumentasi untuk dicatat hasilnya dan akan di analisa lebih lanjut.

1.8.6 Unit analisa data

Dalam melakukan suatu penelitian menentukan unit analisa sangat diperlukan, unit analisa sendiri merupakan satuan yang akan diteliti dan berkaitan dengan subjek penelitian. adapun unit analisis dalam penelitian dapat dilihat dalam table berikut:

No	Jenis Data	Narasumber	Datayang Dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data
1	Primer	Inisiator gercep (gerakan remaja cegah dan pantau Covid-19). Masyarakat sekitar kota semarang	Profil internal capaian gercep. Bentuk dan startegi yang dilakukan ,dan pola sinergitasdalam menjalankan gerakan.	Wawancara mendalam .
2	Sekunder	Dinas kesehatan kota semarang . Data dan kegiatan komunitas (Gercep)	Dokumen kegiatan selama berjalanya <i>Colaborative governance</i>	Dokumentasi

3	Sekunder	Artikel,ilmiah mediamassa ,buku.	Mengkaji literature yang ada kaitanyadengan <i>Collaborative governance</i> .	

Table 4 UNIT ANALISA DATA

1.8.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam tahapan, cara untuk mencari data kemudian menata data yang didapatkan di lapangan, secara sistematis untuk menambah dan meningkatkan ilmu dan pemahaman dan menghasilkan temuannya dan menyajikanya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Bogdan dan Biken dalam (Moleong, 2010) bahwasannya analisis data sebagai upaya untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara lengkap dan dapat dipahami. Teknik analisis dalam penelitian kualitatif ini dapat dirinci ke dalam beberapa tahapan berikut:

1.8.7.1 Reduksi data

Pada tahapan ini dengan cara meresume dan merangkum, memilih hal pokok pokok, kemudian mencermati dan berfokus pada hal tertentu. Di cermati dicari bentuk, tema dan polanya dengan kata lain mensederhanakan memperhalus data data kasar temuan yang di dapatkan dilapangan. Dalam hal ini, peneliti bisa menganalisis data saat pelaksanaan wawancara, penemuan dokumen-dokumen dan saat melakukan observasi. Menganalisa data dilakukan terus menerus dan berlansung secara interaktif hingga bisa diambil kesimpulan dan analisis data merupakan bagian dari keseluruhan proses dari penelitian (Miles & Huberman, 2002). Analisa data dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data, pereduksian data

1.8.7.2 Penyajian data

Pada langkah ini pada dasarnya penyajian data menjelaskan yang kemudian di deskripsikan apabila seluruh informasi yang sudah di dapat kemudian dikumpulkan dan untuk disajikan dalam bentuk uraian singkat yang berhubungan dengan kategori flowchart atau yang lainnya.

1.8.7.3 Penarikan kesimpulan

Dalam prosesnya. ini dimana menemukan hal dan temuan baru yang belum ada sebelumnya atau dengan menyimpulkan hasil hasil yang terjadi di lapangan, dengan teknik memilih, data data kemudian dianalisa. sehingga dapat menjawab permasalahan dan didapatkan kesimpulan yang tepat.

